

## KETAR-KETIR AKAN KESEPAKATAN TRANSFER DATA RI KE AS

Berbagai pihak ketar ketir akan kesepakatan Pemerintah Indonesia mentransfer data pribadi ke Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih pada Rabu (23/7/2025) Presiden AS, Donald Trump, menyatakan "Indonesia juga akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan bahwa Amerika Serikat merupakan negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia". Sementara itu, di Indonesia data pribadi sangat dijaga kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Atas kesepakatan tersebut peringatan dan kekhawatiran muncul dari berbagai pihak, diantaranya dari Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI), Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Pakar Keamanan Siber, hingga Peneliti Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM). Lantas, bagaimana peringatan dan kekhawatiran itu serta seberapa besar dampak dari transfer data tersebut?

BACA HAL 11...

### TENTANG KESEPAKATAN TRANSFER DATA RI-AS

**1 STATUS:**  
Masih negosiasi, belum final.

**2 JENIS DATA:**  
Klaimnya hanya data komersial, tapi ada celah data pribadi ikut mengalir.

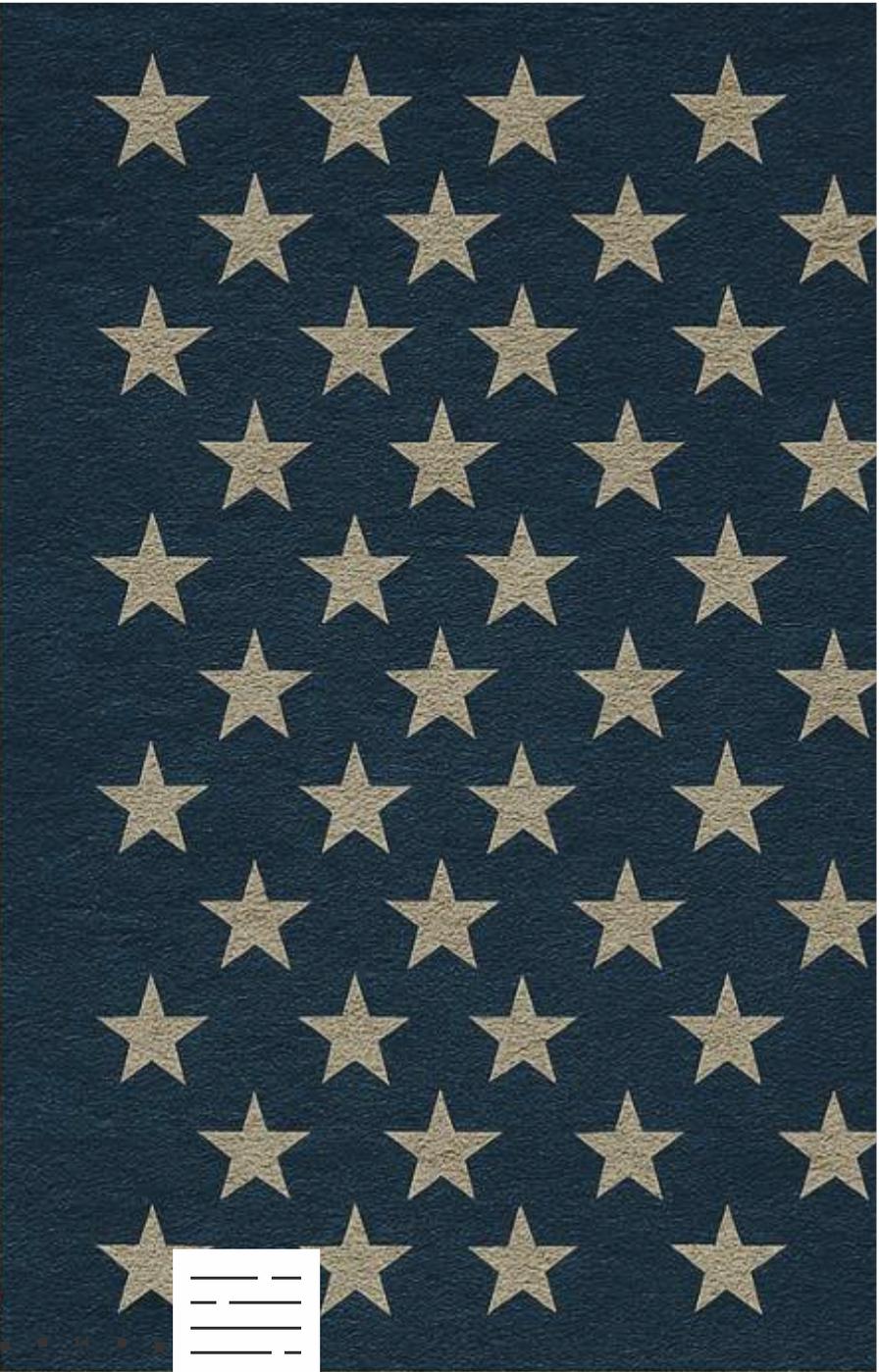
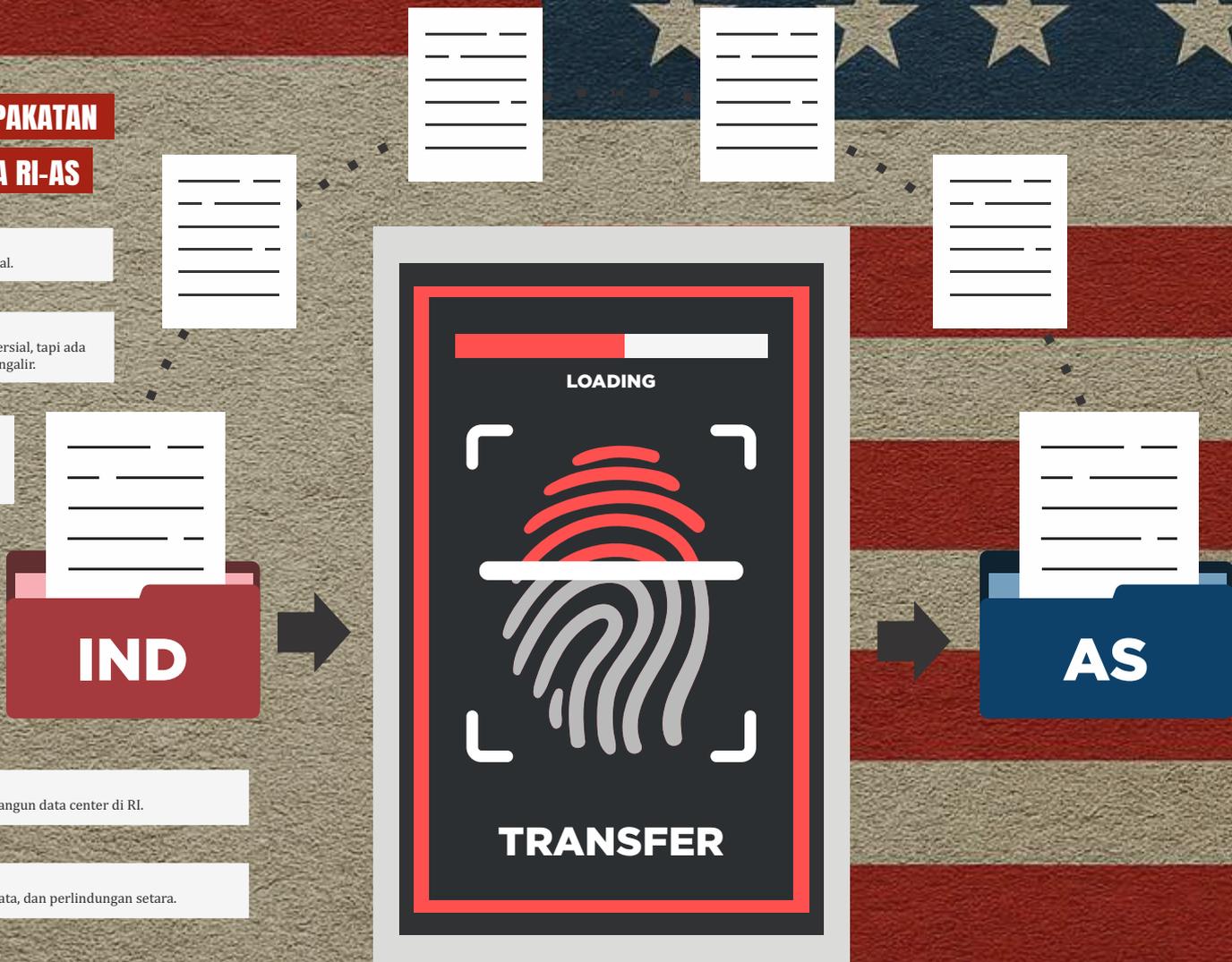
**3 ALASAN PEMERINTAH:**  
Untuk legalisasi transfer data, contoh: Google, WhatsApp, e-commerce.

**4 MASALAH:**  
AS belum punya UU perlindungan data pribadi selevel GDPR.

**5 KRITIK DPR:**  
Wajib tunduk UU PDP, jangan lepas kendali atas data WNI.

**6 DAMPAK LOKAL:**  
Cloud asing bebas tanpa bangun data center di RI.

**7 SARAN PENGAMAT:**  
Harus ada audit, kontrol data, dan perlindungan setara.



Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai pusat sekaligus siap menjadi kunci pertumbuhan industri baterai dan kendaraan listrik dunia. Untuk memantapkan tekad itu, Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan National Battery Research Institute (NBRI) bersama Id Battery dan Pamerindo menyelenggarakan ajang International Battery Summit (IBS) 2025.

**W**akil Koordinator Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional (PHKEN) dan Tenaga Ahli Menteri ESDM, Dimas Muhamad, mendukung penuh upaya ini sebagai bagian dari upaya mendorong daya saing industri nasional.

"Hilirisasi nikel dan material baterai adalah langkah konkret menuju ketahanan energi dan transformasi ekonomi hijau nasional. IBS 2025 sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat industri berbasis sumber daya strategis," katanya pada konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Langkah tersebut sebagai bagian dari visi Indonesia Maju dan implementasi Asta Cita, khususnya pada poin ke-5 terkait memperkuat hilirisasi dan industrialisasi untuk menambah nilai sumber daya alam. Dalam hal ini, pemerintah mendorong hilirisasi sebagai strategi utama dalam transformasi ekonomi nasional.

Hilirisasi di sektor mineral kritis, termasuk nikel dan baterai, menciptakan nilai tambah dalam negeri, memperkuat kemandirian energi, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Dia menandakan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi, melalui konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat. Inisiatif ini menjadi simbol keseriusan Indonesia dalam menjalankan hilirisasi berkelanjutan dan kini menjadi rujukan atau benchmark bagi negara-negara berkembang lainnya.

Sementara itu, IBS 2025 akan berlangsung pada 5-6 Agustus 2025, di Hotel Mulia Jakarta, dan diselenggarakan oleh National Battery Research Institute (NBRI) bersama Id Battery sebagai co-host dan Pamerindo sebagai co-organizer, serta didukung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Ministry Co-Host dan



## INDONESIA SIAP JADI PEMAIN KUNCI INDUSTRI BATERAI DUNIA

Chair of IBS 2025 Evvy Kartini (ketiga kanan), Co Chair of IBS 2025 Reynaldi Istanto (kedua kanan), dan Wakil Koordinator Satgas PHKEN Dimas Muhamad (ketiga kiri) dalam konferensi pers penyelenggaraan IBS 2025 di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM) sebagai Ministry Support.

Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertindak sebagai Ministry Co-Host, menekankan pentingnya hilirisasi sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional.

Seperti yang diketahui, hilirisasi industri, terutama pada sektor baterai, merupakan pilar penting dalam mendorong kemandirian energi nasional. Hilirisasi menciptakan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat daya saing nasional dalam pasar global.

Wakil Koordinator Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional (PHKEN), Dimas Muhamad, menyampaikan hilirisasi di sektor nikel dan material baterai adalah langkah konkret menuju ketahanan energi dan transformasi ekonomi hijau nasional.

Pameran tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat industri berbasis sumber daya strategis. "Dan kami mendukung penuh upaya ini sebagai bagian dari upaya mendorong daya saing industri nasional," katanya.

IBS 2025 diharapkan menjadi barometer kemajuan industri baterai di Indonesia sekaligus katalisator kolaborasi, inovasi, dan investasi. Acara ini menghubungkan para pemangku kepentingan dari seluruh dunia untuk bersama-sama membangun masa depan energi yang bersih, mandiri, dan berkelanjutan.

Chair of International Battery Summit 2025 dan Founder NBRI, Evvy Kartini, mengatakan ajang ini akan menjadi forum strategis global yang

menghadirkan pemangku kepentingan dari seluruh rantai nilai industri baterai dan kendaraan Listrik. Selain itu juga sebagai platform diplomasi energi, termasuk melalui panel "Energy Diplomacy: South-South Nations Cooperation" yang akan melibatkan perwakilan dari kedutaan besar dan pelaku industri internasional.

Dalam konteks ini, arahan dan kehadiran Presiden Republik Indonesia atau perwakilan tingkat tinggi pemerintahan sangat dinantikan untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin kawasan dan pusat kolaborasi global.

"IBS 2025 bukan sekadar summit, tetapi gerakan kolaboratif lintas bangsa untuk membangun masa depan energi dunia khususnya Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki sumber daya, potensi manusia, dan komitmen politik yang kuat. Ini saatnya kita memimpin, bukan hanya ikut," ujar Evvy Kartini.

Dengan mengusung tema "Powering the Future: Advancing the Global Energy Transition with Battery Technology", IBS 2025 diharapkan menjadi barometer kemajuan industri baterai di Indonesia sekaligus katalisator kolaborasi, inovasi, dan investasi. Acara ini menghubungkan para pemangku kepentingan dari seluruh dunia untuk bersama-sama membangun masa depan energi yang bersih, mandiri, dan berkelanjutan.

Co-Chair of IBS 2025 dan Chairman Id Battery, Reynaldi Istanto, menambahkan bahwa tahun ini berharap IBS menjadi platform yang lebih inklusif. Sehingga, lanjutnya, tidak hanya forum teknis, tetapi menjadi ruang dialog strategis untuk mendorong investasi, edukasi, dan integrasi antara pelaku industri lokal

dengan mitra global. "Kami percaya Indonesia memiliki peluang nyata menjadi global hub untuk industri baterai," katanya.

Project Director NBRI dan Executive Director Id Battery, Muhammad Firmansyah, mengatakan Indonesia membutuhkan roadmap jangka panjang yang terintegrasi untuk membangun industri baterai yang kuat dan kompetitif. Ini tidak hanya soal kendaraan listrik, tetapi juga pemanfaatan teknologi penyimpanan energi untuk masyarakat, misalnya pemanfaatan panel surya dan baterai di sektor rumah tangga dan industri. IBS 2025 menjadi titik temu penting untuk menyatukan visi tersebut.

IBS 2025 menjadi bagian dari rangkaian menuju The Battery Show Indonesia 2025, dan Pamerindo Indonesia siap menyukseskannya sebagai co-organizer. "Pamerindo mendukung penuh IBS 2025 sebagai bagian dari komitmen kami dalam memperkuat konektivitas industri. Kami melihat IBS sebagai platform strategis untuk menghadirkan pelaku industri global dan mendorong pertumbuhan sektor energi baru terbarukan di Indonesia," ungkap, Country Manager Pamerindo Indonesia, Lia Indriasari.

Dukungan terhadap IBS 2025 juga datang dari sektor swasta. Huayou Indonesia, sebagai Sponsor Platinum IBS 2025. "Kami percaya Indonesia akan memainkan peran vital dalam rantai pasok global untuk baterai kendaraan listrik. IBS 2025 adalah platform yang tepat untuk memperkuat kolaborasi antara pemain global dan mitra lokal, dan kami bangga menjadi bagian dari perjalanan ini," kata Deputy General Manager, Huayou Indonesia Regional Management Center, Marvel Hu. (ant,rls/lt)

# Temukan Tujuh Permasalahan Utama Pada Haji 2025, DPR Akan Bentuk Pansus



Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (ANTARA)

**DPR RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji 2025. Pembentukan Pansus tersebut berdasarkan rekomendasi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2025 setelah menemukan tujuh permasalahan utama dalam pelaksanaan haji.**

“**A**pakah laporan hasil pengawasan di Timwas DPR RI pada pelaksanaan penyelenggaraan Haji tahun 2025 dapat disetujui untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku?” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025), pertanyaan tersebut langsung dijawab setuju oleh hadirin.

Sementara itu, Ketua Timwas Haji DPR RI 2025, Cucun Ahmad Syamsurizal, mengatakan bahwa pengawasan haji merupakan tugas konstitusional dalam rangka memastikan hak-hak jemaah haji terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu juga untuk menjamin pelayanan yang adil, aman, profesional, dan menjamin keselamatan.

Cucun mengatakan dalam menjalankan tugasnya, Timwas Haji DPR RI terbagi menjadi dua tim. Tim pertama melakukan pengawasan pada tahap persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan, tim kedua melakukan pengawasan langsung terhadap pelayanan jemaah di Madinah dan Makkah.

Dalam pengawasan tersebut, Cucun mengungkapkan pihaknya banyak menemukan berbagai bentuk ketidaksesuaian kebijakan dalam penyelenggaraan haji. Dia

menandakan seharusnya kebijakan tersebut sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam kontrak antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan pihak syarikah.

Selain itu juga tujuh permasalahan utama dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut.

Untuk itu, dia merekomendasikan untuk membentuk Pansus Haji 2025, mengingat dalam melakukan evaluasi tersebut perlu melibatkan lintas komisi di DPR RI dan Timwas Haji DPR RI.

Lebih lanjut dia menjelaskan sejumlah bentuk ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan haji tersebut yakni tidak sesuainya kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah, serta implementasi pelayanan jemaah haji. Menurut dia, pemenuhan hak jemaah haji yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Sedangkan terkait dengan tujuh permasalahan utama yang ditemukan Timwas, Cucun menjelaskan, permasalahan tersebut meliputi:

Pertama, dalam aspek kebijakan, ditemukan ketidakcocokan data pengelompokan jemaah antara sistem di Indonesia dan Arab Saudi. Timwas juga menemukan terjadi keterlambatan dalam pendistribusian kartu Nusuk. Kemudian, skema Murur

serta Tanazul yang ditujukan untuk mengurai kepadatan di Muzdalifah dan Mina tidak dijalankan.

Kedua, Timwas memberikan catatan pada sisi akomodasi, sebab banyak jemaah yang tidak memperoleh layanan pemondokan yang layak. “Ada jemaah yang terpaksa bermalam di musala atau menumpang di hotel lain karena kamar tidak tersedia,” ungkap Cucun yang merupakan Politisi Fraksi PKB ini.

Ketiga, terkait dengan konsumsi di mana sebagian besar makanan yang disediakan tidak sesuai dengan kontrak dan melanggar keputusan Panja Haji Komisi VIII DPR RI. Bahkan, sejumlah jemaah tidak mendapatkan konsumsi yang semestinya saat puncak haji di Arafah dan Mina.

Keempat, dari sisi transportasi juga dinilai bermasalah. Sebab terjadi keterlambatan signifikan dalam pengangkutan jemaah dari dan ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Cucun membeberkan seperti pada trip pertama yang dijadwalkan pukul 07.00–11.00 WAS, namun baru diberangkatkan pada pukul 15.00 WAS, sehingga berdampak pada keterlambatan seluruh gelombang berikutnya.

Kelima, terkait dengan kesehatan, Timwas juga menemukan jemaah tidak memenuhi syarat

istitha'ah kesehatan. Selain itu, terdapat larangan layanan kesehatan di hotel yang menyulitkan akses jemaah terhadap layanan medis.

Keenam, kualitas SDM petugas haji juga menjadi sorotan. Masih ditemukan petugas yang tidak kompeten dan tidak mampu memberikan layanan secara optimal di bidang akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan.

Ketujuh, dalam aspek keimigrasian, Timwas mencatat adanya sejumlah warga negara Indonesia yang berangkat menggunakan visa non-haji dan lolos masuk ke Arab Saudi. “Kejadian ini sangat memprihatinkan karena turut menimbulkan korban jiwa,” ujar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.

Cucun menegaskan dengan adanya temuan-temuan tersebut, menjadi bahan evaluasi strategis bagi DPR RI untuk mendorong perbaikan menyeluruh dalam penyelenggaraan haji ke depan. Evaluasi ini juga akan menjadi dasar pengambilan sikap politik DPR RI, termasuk usulan pembentukan Pansus dan penggunaan Hak Angket dalam penanganan persoalan haji tahun 2025.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Timwas Haji DPR RI mendorong pemerintah untuk mengadaptasi dan mengharmonisasi kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait digitalisasi dan data siskohat jemaah haji agar sinkron dan valid dengan sistem E-Haji Arab Saudi.

Kemudian, kata dia, Timwas juga mendorong jemaah haji yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan kompensasi dari penyedia layanan.

Timwas juga, menurut dia, memberi perhatian serius atas belum ditemukannya tiga orang jemaah haji yang hilang. Dia mendesak Kementerian Agama untuk terus mencari dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait di Arab Saudi termasuk pemerintahan kerajaan Arab Saudi. rls,ant/lut



**"Beberapa hal penting sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji di masa yang akan datang, sehingga ada kepastian hak-hak jemaah haji terpenuhi dan terlindungi secara maksimum,"**

**CUCUN AHMAD SYAMSURIZAL**

Ketua Timwas Haji DPR RI 2025

# NAIK KE PENYIDIKAN, SIAPA TERSANGKA UTAMA BERAS OPLOSAN?

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan beredarnya beras yang tidak sesuai dengan mutu standar atau dikenal sebagai kasus beras oplosan. Meski demikian, perkara ini telah resmi naik status ke tahap penyidikan.



Beras oplosan ditampilkan saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (Ist)

**K**etua Satgas Pangan Polri Brigadir Jenderal Helifi Assegaf menjelaskan bahwa penyidik saat ini masih fokus dalam melengkapi alat bukti dan meminta keterangan para saksi ahli, termasuk ahli perlindungan konsumen dan ahli uji laboratorium.

"Penetapan tersangka itu minimal dua alat bukti. Ini sedang kita lengkapi semua. Kita sedang proses pemanggilan ahli perlindungan konsumen dan ahli uji lab. Ketika sudah selesai, baru kita lengkapi untuk lakukan gelar perkara," ujar Helifi dalam konferensi pers, Kamis (24/7/2024).

Helifi menyebutkan bahwa hasil uji laboratorium terhadap kandungan beras akan menjadi bahan penting dalam penilaian. Nantinya, hasil tersebut akan dianalisis dan dipaparkan oleh ahli perlindungan konsumen kepada penyidik guna menentukan adanya pelanggaran hukum.

"Selain itu kita juga menyiapkan dokumen yang berkesesuaian dengan perkara ini. Masih banyak yang harus kita lengkapi kembali, kita kualifikasi dulu dan kita match-kan dengan fakta yang ada di lapangan," tambahnya.

Dari hasil penyelidikan sementara, ditemukan tiga produsen yang diduga terlibat dalam peredaran beras dengan mutu tidak sesuai standar. Ketiganya memproduksi lima merek beras yang dikemas dan dijual sebagai beras premium. Produsen tersebut meliputi PT PIM dengan merek Sania; PT FS dengan merek Ramos Merah, Ramos Biru, dan Ramos Pulen, serta Toko SY dengan merek Jelita dan Anak Kembar.

"Dari hasil penyelidikan sementara ditemukan 3 produsen atas 5 merek tersebut, yaitu merek beras premium," kata Helifi.

Kepolisian menduga bahwa praktik ini bukan hanya melanggar

ketentuan perlindungan konsumen, tetapi juga berpotensi masuk dalam kategori Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pasal yang disangkakan mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f, serta dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Satgas Pangan Polri mendalami penyidikan kasus beras oplosan dari produsen yang melanggar mutu dan takaran. Polisi kini tengah membidik tersangka dalam perkara tersebut. Baik dari perorangan atau pun korporasi.

"Nanti tersangka bisa perorangan dan bisa korporasi. Kenapa demikian? Karena profitnya otomatis perusahaan akan menikmati, pelakunya pihak-pihak yang ditunjuk melakukan ini," jelas Direktur Tindak Pidana Ekonomi

Khusus (Dirtipideksus) sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helifi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).

Menurutnya, para pelaku usaha melanggar aturan dengan melakukan produksi beras premium dengan merek yang tidak sesuai standar mutu yang tertera pada label kemasan.

Modus lainnya adalah menggunakan mesin produksi, baik modern maupun tradisional untuk mengakali komposisi dan takaran.

"Dari perkara yang kita tangani menggunakan alat modern, pasti disetting beras ini berat 15 Kg, tinggal pencet satu dan lima. Artinya niat jahat sudah di situ, jadi tidak ada (alasan) saya nggak ngerti, tidak ada. Karena apa yang dia tekan itu langsung jadi isi kemasan itu," jelas dia. (wid,rls,ist,ant/dya)

## Kejagung

### Panggil 6 Produsen Pekan Depan

**KEJAKSAAN** Agung (Kejagung) juga mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi ketidaksesuaian standar mutu dan takaran beras. Penyelidikan ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan produsen 'nakal' yang merugikan masyarakat.

"Kejaksaan juga melalui tim Satgasus P3TPK (Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi) pada Gedung Bundar telah memulai melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia (SNI) dan harga eceran tertinggi (HET) yaitu yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Kepala Pusat P e n e r a n g a n H u k u m (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).

Anang menyebut Satgasus P3TPK telah turun ke lapangan melakukan penyelidikan. Namun

dia enggan membeberkan temuan yang diperoleh penyidik.

"Yang jelas tim penyidik sudah mempunyai data," ucapnya.

Terkait temuan itu, Anang mengatakan pihaknya akan memanggil enam produsen beras. Seluruhnya diagendakan untuk diperiksa pada Senin (28/7/2025) mendatang.

"Kejaksaan sudah melakukan pemanggilan terhadap enam perusahaan. Kita sudah melakukan pemanggilan, hari Rabu kemarin sudah melakukan pemanggilan untuk hadir hari Senin," ungkap Anang.

Dia merinci enam produsen beras yang dipanggil, yakni PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Anang menuturkan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan awal. Karena itu, dia belum bisa menjelaskan lebih rinci perihal itu.

## Kronologi Kasus Beras Oplosan

- **Awal Temuan (Juni 2024)**  
Satgas Pangan Polri menerima laporan soal beras premium bermutu rendah yang tak sesuai label dan harga.
- **Penyelidikan Awal (Akhir Juni 2024)**  
Bareskrim ambil sampel dari pasar dan distributor, lalu kirim ke laboratorium.
- **Hasil Uji Lab (Awal Juli 2024)**  
Terbukti sejumlah beras premium ternyata hanya beras medium yang dikemas ulang.
- **Pemeriksaan Produsen (Pertengahan Juli 2024)**  
- Polri periksa produsen:  
- PT PIM (merek Sania)  
- PT FS (merek Ramos Merah/Biru/Pulen) Toko SY (merek Jelita, Anak Kembar) Ketiganya diduga menjual beras medium sebagai premium.
- **Kasus Naik ke Penyidikan (22 Juli 2024)**  
Status perkara resmi masuk tahap penyidikan. Belum ada tersangka.

"Tujuan dari proses hukum yang kita lakukan ini dengan harapan ke depannya dapat mengembalikan proses atau ekosistem distribusi dan penjualan beras dilaksanakan dengan sesuai ketentuan," pungkasnya.

Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga tengah mengusut kasus dugaan beras oplosan yang tidak memenuhi standar mutu, kualitas, dan volume. Perkara itu kini telah naik ke tahap penyidikan. (wid,rls,ist/dya)

# DBHCHT Tahun 2025, Pemkab Blitar Manfaatkan Rp36,2 Miliar untuk Tiga Sektor Prioritas

**B** LITAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar berkomitmen memaksimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 sebesar Rp36,2 miliar. Ada tiga sektor prioritas yakni kesejahteraan, penegakan hukum dan kesehatan.

Disampaikan Kabag Perekonomian Setda Pemkab Blitar, Badrodin penerimaan DBHCHT Pemkab Blitar tahun 2025 mengalami kenaikan sekitar Rp1 miliar dibanding 2024, menjadi sebesar Rp36.285.765.000.

"Peningkatan ini, karena jumlah pabrik rokok di Kabupaten Blitar bertambah dan produksinya juga naik," ujar Badrodin.

Namun, pemanfaatannya sudah ditentukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 72 tahun 2024 tentang penggunaan DBHCHT tahun 2025.

"Ada perubahan pemanfaatan yang harus dilaksanakan semua daerah, yakni meniadakan anggaran prioritas daerah. Seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang," jelasnya.

Diungkapkan Badrodin, sesuai data Bagian Perekonomian Sekda Pemkab Blitar mencatat pemanfaatan DBHCHT tahun 2024 lalu, anggaran prioritas daerah mencapai Rp7,3 miliar.

Diantaranya untuk pembangunan jembatan Kaligambir di Kecamatan Pangungrejo Rp4 miliar, pengadaan 2 unit mikrobus pelajar sebesar Rp1,3 miliar. Kemudian pengadaan satu truk angkutan sampah senilai Rp720 juta dan enam unit kontainer sampah senilai Rp390 juta.

"Sesuai PMK 72 tahun 2024, maka anggaran prioritas daerah seperti pembangunan jalan di luar areal pertanian tembakau misalnya, sudah



Bupati Blitar, Rijanto saat menyerahkan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga petani penerima bantuan jaminan sosial melalui program Aji Tani. (Foto: Humas Pemkab Blitar)

tidak diperbolehkan. Bisanya dialihkan ke kesehatan dan dukungan peningkatan kualitas bahan baku dan pelatihan," paparnya.

Berdasarkan PMK 72 tahun 2024, penggunaan DBHCHT tahun 2025 telah dibagi ke dalam tiga sektor prioritas. Sebanyak 50 persen dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, 10 persen untuk penegakan hukum, dan 40 persen sisanya untuk sektor kesehatan.

Dengan rincian, untuk sektor Kesejahteraan Masyarakat (non-Bantuan Langsung Tunai/BLT) sebesar Rp7,9 miliar, Kesejahteraan Masyarakat (BLT) Rp9,8 miliar, Penegakan Hukum Rp2,6 miliar, Kesehatan Rp15,5 miliar, dan Pendukung Pengelolaan DBHCHT: Rp300 juta.

Adapun beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Blitar yang akan menerima dan mengelola DBHCHT antara lain Diskominfo, Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan,

Disperindag, DKPP, Dinsos, dan Bagian Perekonomian. (Rincian DBHCHT yang diterima OPD ada dalam tabel)

Dalam bentuk sosialisasi, penertiban rokok ilegal, pelatihan SDM pabrik rokok, perbaikan irigasi lahan tembakau, pemberian BLT buruh tembakau dan non-BLT, jaminan kesehatan petani tembakau dan inovasi program lainnya sesuai aturan pemanfaatan DBHCHT.

Sesuai arahan Bupati Blitar, Rijanto bahwa pemanfaatan DBHCHT harus tepat sasaran, sesuai dengan aturan untuk tiga sektor prioritas yaitu, kesejahteraan, penegakan hukum dan kesehatan masyarakat.

"Dalam pelaksanaan pemanfaatan DBHCHT, Pemkab Blitar juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi ketat," imbuh Badrodin.

Sementara itu dalam beberapa kesempatan, Bupati Blitar Rijanto mengatakan setiap program dan kegiatan yang didanai DBHCHT, harus berjalan sesuai dengan peraturan dan memberikan dampak

## Alokasi DBHCHT Tahun 2025 pada OPD di Pemkab Blitar:

- Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp15,2 miliar
- Dinas Sosial (Dinsos) Rp8,8 miliar
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Rp5,6 miliar
- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Rp2,5 miliar
- Satpol PP Rp1,8 miliar
- Dinas Kominfo Rp875 juta
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Rp800 juta
- Bagian Perekonomian Setda Rp300 juta

positif yang nyata bagi masyarakat Blitar.

Pemanfaatan alokasi DBHCHT tahun 2025 tidak hanya sekadar angka dan program, melainkan sebuah komitmen nyata Pemkab Blitar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, khususnya mereka yang selama ini menjadi pilar utama dalam industri tembakau.

"DBHCHT adalah jembatan harapan bagi banyak keluarga di Blitar, kami ingin setiap rupiah yang disalurkan membawa perubahan positif dan berdampak langsung ke masyarakat," tandas Bupati Rijanto. (\* /ais /dya)

## Kasus Pemerasan Izin Kerja TKA KPK Tahan Empat Tersangka Lagi

**J**AKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan empat tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup. Pelaksana Tugas Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa penahanan ini merupakan lanjutan dari proses

hukum terhadap delapan tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, KPK kembali melakukan penahanan terhadap empat dari total delapan tersangka yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2025," ujar Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (24/7/2025).

Empat tersangka yang baru ditahan berinisial GTW, PCW, JS, dan

AE. Mereka adalah Gatot Widiartono, Koordinator Bidang Analisis dan PPTKA Kemenaker periode 2021-2025; Putri Citra Wahyoe, petugas Saluran Siaga RPTKA dan Verifikator Kemenaker periode 2019-2025; Jamal Shodiqin, Analis Tata Usaha dan Pengantar Kerja Ahli Pertama; serta Alfa Eshad, Pengantar Kerja Ahli Muda periode 2018-2025.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap empat tersangka untuk 20 hari pertama, yakni terhitung

sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai 12 Agustus 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK," lanjut Asep.

Sebelumnya, pada 17 Juli 2025, KPK telah menahan empat tersangka lain dalam kasus yang sama, yaitu mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker Suhartono (SH), Haryanto (HY), mantan Direktur PPTKA Wisnu Pramono (WP), dan Devi Anggraeni (DA). Delapan tersangka tersebut pertama kali diumumkan oleh KPK pada 5 Juni 2025.

Menurut hasil penyidikan, para tersangka diduga melakukan pemerasan terhadap para pemohon RPTKA sejak tahun 2019 hingga 2024, dengan total pungutan mencapai Rp53,7 miliar. (wid,rls,ist/dya)

# Efisiensi Kabupaten Malang Capai Rp93,6 M, Terbesar Digeser ke Kesehatan dan Infrastruktur



Kepala BKAD Kabupaten Malang, Yetty Nurhayati. (Santi/Lentera)

**MALANG-** Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah melakukan efisiensi anggaran mencapai Rp93,6 miliar dalam pelaksanaan APBD 2025. Sektor infrastruktur dan sanitasi, serta bidang kesehatan, menjadi penerima pergeseran alokasi anggaran terbesar dari hasil efisiensi tersebut.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, Yetty Nurhayati, menjelaskan efisiensi

ini sesuai Inpres 1/2025 dan bersumber dari dana block grant, yakni bantuan keuangan dari pemerintah pusat, yang penggunaannya diserahkan kepada daerah.

"Seluruh proses pengalihan dana hasil efisiensi tersebut dilakukan berpedoman pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ, tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD

Tahun Anggaran 2025," ujar Yetty, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (24/7/2025).

Yetty menegaskan, pengalihan dana hasil efisiensi tersebut tidak menunggu mekanisme perubahan APBD. Melainkan langsung dilakukan melalui proses pergeseran anggaran.

Hal ini memungkinkan percepatan pelaksanaan program prioritas di

tengah tahun anggaran yang saat ini berjalan. "Pergeseran anggaran sudah dilakukan, ya. Jadi, tidak menunggu perubahan APBD," katanya.

Dari total Rp93,6 miliar, disebutkannya, alokasi terbesar diberikan untuk sektor infrastruktur dan sanitasi, yakni sebesar Rp60,8 miliar. Sektor kesehatan menempati urutan kedua dengan alokasi sebesar Rp8,9 miliar.

Selain itu, sebesar Rp22,3 miliar juga dialokasikan untuk program prioritas lainnya yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, serta pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, untuk optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, dialokasikan sebesar Rp100 juta. Serta untuk penyediaan cadangan pangan dialokasikan senilai Rp1,3 miliar.

Lebih lanjut, Yetty menyampaikan, guna memastikan dana hasil efisiensi ini terserap secara maksimal dan tidak menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi percepatan.

Salah satunya adalah mendorong perangkat daerah untuk melakukan

lelang dini. "Percepatan realisasi belanja kami dorong melalui pelaksanaan lelang dini, percepatan realisasi tanpa menunda administrasi pertanggungjawaban, serta penyusunan rencana kegiatan dan penjadwalan secara konsisten," jelas Yetty.

Terpisah, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurcahyo, menambahkan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025, secara umum telah berjalan dengan baik dan memasuki paruh kedua tahun anggaran.

"Program-program kami sudah berjalan, dan serapan anggarannya mendekati 50 persen. Untuk rincian lebih lengkapnya bisa dilihat di BKAD karena mereka yang pegang data realisasi," kata Nurcahyo.

Dirinya juga menyampaikan, sejumlah program besar akan mulai direalisasikan pada semester kedua tahun 2025 ini. Program-program tersebut berasal dari tiga sektor yang menyerap porsi anggaran terbesar dalam struktur APBD Kabupaten Malang. Meliputi sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. (Santi/Dya)

## Percepat Pengisian Jabatan Kosong, Kota Malang Terapkan Manajemen Talenta di 2026

**MALANG-** Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan penerapan sistem manajemen talenta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun 2026. Langkah ini diyakini dapat mempercepat pengisian jabatan kosong di lingkungan birokrasi. Sebab, prosesnya tak harus menunggu seleksi terbuka yang memakan waktu.

"Kami sudah mulai bertahap untuk membangun dan menerapkan manajemen talenta. Tahapan dan parameter sudah kami lakukan. Karena saya sudah diminta Pak Kepala BKN pada saat retreat dulu, jadi insyaallah Kota Malang tahun depan bisa menerapkan manajemen talenta dan sudah siap," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Kamis (24/7/2025).

Menurut Wahyu, meskipun penerapan penuh baru akan dimulai pada 2026, upaya percepatan tetap dilakukan sejak saat ini. Hal ini termasuk dalam upaya mendorong efektivitas tata kelola kepegawaian, terutama untuk mengantisipasi

kekosongan jabatan tinggi pratama (JPT) yang saat ini sebagian masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

"Saat ini memang untuk posisi 5 JPT yang diisi Plt, akan kami. Nah untuk (kesiapan penerapan) manajemen talenta sambil berjalan. Jadi kami tidak menunggu manajemen talenta selesai diterapkan baru kita isi, biar sama-sama jalan," jelasnya.

Dengan penerapan sistem ini, Wahyu optimistis tidak akan ada lagi kekosongan jabatan yang berlangsung lama. Bahkan, ia menegaskan, proses pengisian jabatan bisa dilakukan hanya dalam hitungan hari jika ada posisi yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya.

"Kalau ada jabatan yang kosong, misalnya hari itu juga ada yang pensiun, nanti 2-3 hari sudah ada pengganti. Jadi tidak sampai ada kekosongan lagi, karena melahirkan potensi itu betul-betul menjadi perhitungan dari manajemen talenta," tegasnya.

Lebih lanjut, sistem manajemen talenta akan memperhitungkan kecocokan ASN berdasarkan golongan, pangkat, dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD). Termasuk bagi dinas-dinas baru hasil pemecahan yang saat ini tengah diusulkan oleh Pemkot Malang.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Hendru Martono, menjelaskan manajemen talenta merupakan bagian dari penerapan sistem merit. Dalam sistem ini, ASN dinilai berdasarkan rekam jejak, hasil asesmen kompetensi, dan kinerja, yang



(Ilustrasi) ASN di lingkup Pemkot Malang. (Santi/Lentera)

kemudian dipetakan melalui sistem aplikasi khusus.

"Di situ sudah ada aplikasi yang bisa menilai kompetensi dan kinerja setiap PNS berdasarkan rekam jejaknya, profil, asesmen, dan hasil kinerja," jelas Hendru. (Santi/Dya)

# ISHIBA BERTAHAN DI TENGAH GUNCANGAN POLITIK JEPANG

**Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengundurkan diri dari jabatan, meskipun Partai Demokrat Liberal (LDP) mengalami kekalahan dalam pemilihan Majelis Tinggi. Pernyataan ini disampaikan sebagaimana dilaporkan oleh NHK pada Kamis (24/7/2025).**

**D**alam pemungutan suara, Minggu (20/7/2025), koalisi yang berkuasa yang terdiri dari LDP dan mitranya Komeito kehilangan mayoritas di majelis. Akibatnya, mereka kini menjadi minoritas di kedua kamar parlemen.

Meski demikian, seruan untuk pengunduran diri Ishiba terus bergema dari dalam partai. Rabu (23/7/2025), Ishiba mengadakan pertemuan dengan tiga mantan perdana menteri, yaitu Aso Taro, Suga Yoshihide, dan Kishida Fumio.

Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 80 menit itu membahas situasi partai dan masa depan kepemimpinan. Ishiba mengatakan, mereka memiliki rasa krisis yang sama dan sepakat partai tidak boleh terpecah.

Ia menegaskan, isu pengunduran dirinya tidak dibahas dalam pertemuan tersebut. Ishiba juga membantah laporan media yang menyebut bahwa ia akan mundur.

Ishiba menyatakan, dirinya tetap berkomitmen menjalankan tugas sebagai perdana menteri. Ia menambahkan, masih banyak isu kebijakan mendesak yang perlu ditangani, termasuk kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait tarif perdagangan.

Ia juga menyoroiti rencana pembentukan badan nasional untuk manajemen bencana sebagai salah satu prioritasnya. Seorang pejabat senior pemerintah menyatakan Ishiba masih memiliki agenda penting yang ingin diselesaikan.

Di tengah situasi ini, pimpinan LDP

akan mengadakan pertemuan dengan para anggota parlemen partai, Senin (28/7/2025). Selain itu, LDP berencana membentuk badan khusus untuk mengevaluasi hasil pemilu, dengan target penyelesaian evaluasi akhir bulan depan.

Namun, tekanan internal terhadap Ishiba terus meningkat. Beberapa anggota LDP secara terbuka menyerukan agar ia mundur dan mendesak dilakukan perombakan dalam kepemimpinan partai.

Anggota parlemen muda dan sejumlah politikus mendorong diadakannya rapat pleno bersama

semua anggota parlemen partai. Mereka menyatakan, tanggung jawab atas kekalahan pemilu harus dijelaskan secara terbuka.

Dalam rapat daring yang diselenggarakan oleh divisi pemuda partai, banyak peserta juga menyuarakan tuntutan yang sama. Mereka menuntut dilakukannya perombakan kepemimpinan sesegera mungkin.

Sementara itu, Mantan Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, mengingatkan Perdana Menteri

Shigeru Ishiba agar memahami situasi politik yang tengah dihadapi pascakekalahan telak Partai Demokrat Liberal (LDP) dalam pemilu Majelis Tinggi Jepang, Minggu (20/7/2025).

"Beliau (PM Ishiba) harus mengerti sendiri keadaan saat ini. Yang terpenting adalah jangan sampai terjadi perpecahan di dalam LDP," ujar Suga kepada pers usai pertemuan dengan Ishiba, Taro Aso dan Fumio Kishida pada Rabu (23/7/2025). (NHK, Bloomberg, ist/nei)



Perdana Menteri Jepang dan Presiden Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, Shigeru Ishiba, terlihat setelah bertemu dengan para petinggi partai di kantor pusat LDP di Tokyo, Jepang, Rabu (23/7/2025). (REUTERS)

## Menang Pemilu, Sanseito Gaungkan Agenda Anti-Imigran



Pemimpin partai oposisi Jepang, Sanseito, Sohei Kamiya, tersenyum saat berbicara kepada awak media di pusat penghitungan suara di Tokyo dalam pemilu Jepang pada Minggu (20/7/2025). Sanseito diproyeksikan meraih kemenangan besar. (Foto: AFP)

**PARTAI** nasionalis berhaluan kanan, Sanseito, mengalami peningkatan tajam dalam hasil pemilu majelis tinggi Jepang yang digelar baru-baru ini.

Mengusung agenda anti-imigran dan anti-globalisasi, Sanseito kini menjadi kekuatan oposisi keempat terbesar di parlemen Jepang.

Didirikan pada 2020 saat pandemi COVID-19, Sanseito berhasil meraih 14 kursi di majelis tinggi dari sebelumnya hanya satu kursi sejak 2022.

Keberhasilan ini menempatkannya di belakang tiga partai oposisi utama, Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP), Partai Demokrat untuk Rakyat

(DPP), dan Nippon Ishin no Kai.

"Ini salah satu lonjakan paling mengejutkan dalam lanskap politik Jepang dalam beberapa tahun terakhir," ujar seorang pengamat politik lokal kepada Japan Times.

Sanseito meraup suara lewat kampanye bertema "Japanese First", semboyan nasionalis yang menyoroiti kekhawatiran warga terhadap meningkatnya jumlah imigran, inflasi, serta kekecewaan

terhadap pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba.

Diketahui, jumlah penduduk asing di Jepang mencapai rekor 3,8 juta orang pada 2024, sementara jumlah wisatawan menembus 37 juta.

Meski angka itu kecil dibanding total populasi Jepang, lonjakan ini memicu ketidaknyamanan sebagian pemilih.

"Di bawah globalisme, perusahaan multinasional telah mengubah kebijakan Jepang demi kepentingan mereka," ujar Sohei Kamiya, Ketua Sanseito, dalam kampanye baru-baru ini.

"Jika kita tidak melawan tekanan

asing ini, Jepang akan menjadi koloni," imbuhnya.

Kamiya adalah mantan anggota Partai Demokrat Liberal (LDP) dan pernah mencalonkan diri dalam pemilu 2012 dengan dukungan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, namun kalah.

Ia kemudian mendirikan Sanseito dan terpilih ke majelis tinggi pada 2022.

Kampanye "Japanese First" membuat Partai Sanseito banyak dituduh xenofobia.

Meski anggapan tersebut dibantah oleh Kamiya, platform Sanseito justru mencantumkan sejumlah kebijakan kontroversial, antara lain membatasi jumlah penduduk asing hingga maksimal 5 persen dari populasi di setiap daerah, memperketat aturan naturalisasi dan izin tinggal, serta melarang warga naturalisasi menduduki jabatan publik.

Sanseito juga mengusulkan pembatasan jumlah pekerja asing dan turis, serta menyerukan larangan kebijakan keragaman budaya.

Sementara itu, Kamiya secara terbuka mengakui bahwa ia banyak terinspirasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk dalam gaya kampanye dan retorika anti-globalisme. (Japan Times, BBC, Euronews, ist/nei)

# Kaya Nutrisi, Daging Unta Makin Dilirik Konsumen

**D**aging unta termasuk jenis daging merah yang kaya protein namun rendah lemak. Di sejumlah negara, daging ini telah menjadi bagian dari konsumsi harian. Sementara itu, di Indonesia, daging unta mulai populer sebagai alternatif sehat untuk meningkatkan asupan nutrisi.

Daging unta kini semakin populer di Indonesia, terutama karena kandungan protein yang tinggi dan kadar lemak jenuh yang rendah. Teksturnya yang empuk dan rasa sedikit manis membuat daging ini digemari banyak orang. Selain mudah diolah menjadi berbagai masakan, daging unta juga dipercaya memiliki manfaat kesehatan yang tidak kalah dengan jenis daging lainnya.

## Manfaatnya bagi Kesehatan

Berkat kandungan nutrisinya yang melimpah, tidak heran jika daging unta memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

### Mencegah Anemia

Daging unta merupakan sumber zat besi hewani yang mudah diserap oleh tubuh. Nutrisi ini sangat penting untuk pembentukan hemoglobin, yaitu zat dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Orang yang kekurangan zat besi akan lebih mudah merasa lemas, lelah, dan tampak pucat, terutama pada ibu hamil, anak-anak, serta lansia.

### Menjaga Berat Badan

Daging unta cocok dikonsumsi oleh Anda yang sedang diet. Pasalnya, tingginya kandungan protein dan kadar lemak jenuh di dalamnya yang relatif rendah membuat Anda bisa mendapatkan asupan protein yang baik tanpa khawatir menambah lemak

berlebihan di dalam tubuh. Protein yang cukup akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama, sehingga nafsu makan pun lebih mudah dikontrol. Selain itu, konsumsi protein yang tepat dapat membantu mempertahankan massa otot selama proses penurunan berat badan.

### Meningkatkan Massa Otot

Daging unta mengandung protein berkualitas yang sangat dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Bagi Anda yang aktif berolahraga atau menjalani latihan beban, memenuhi kebutuhan protein dari makanan, seperti daging unta, sangat membantu proses pemulihan dan pembentukan otot.

Selain itu, kombinasi antara konsumsi protein dan olahraga secara rutin akan membantu meningkatkan massa otot secara optimal. Otot yang sehat dan kuat tidak hanya penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari, tapi juga berperan menjaga metabolisme tubuh tetap baik.

### Memperkuat Sistem Imun Tubuh

Selain meningkatkan massa otot, daging unta juga dipercaya bisa memperkuat sistem imun tubuh. Hal ini karena berbagai kandungan nutrisi, seperti zinc, selenium, dan vitamin B kompleks berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Nutrisi tersebut dapat membantu tubuh memproduksi antibodi dan meningkatkan fungsi sel-sel imun dalam melawan infeksi.

Jika daya tahan tubuh terjaga dengan baik, Anda

adi tidak mudah sakit dan lebih cepat pulih saat terkena penyakit.

### Menjaga Kesehatan Tulang dan Saraf

Kandungan kalium, fosfor, dan vitamin B12 pada daging unta berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang. Nutrisi ini membantu menjaga kekuatan dan kepadatan tulang, sehingga Anda terhindar dari masalah seperti tulang keropos (osteoporosis).

### Menjaga Kesehatan Jantung

Manfaat daging unta yang tak kalah penting lainnya adalah menjaga kesehatan jantung. Kandungan lemak jenuh dalam daging unta diduga lebih rendah dibandingkan daging sapi atau kambing. Selain itu, daging ini juga mengandung sejumlah asam lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung. Lemak baik ini dapat membantu menjaga kadar kolesterol dalam darah tetap stabil.

### Cara Memilih Daging Unta yang Tepat

Memilih daging unta yang berkualitas menjadi langkah penting agar manfaat nutrisinya bisa diperoleh secara optimal. Saat memilih daging unta, pastikan warnanya merah cerah dan segar, bukan pucat atau kecoklatan.

Tekan permukaannya; daging segar akan terasa kenyal dan kembali ke bentuk semula setelah ditekan. Hindari daging yang berbau asam, anyir, atau tidak sedap, karena bisa menandakan

bahwa daging tersebut sudah tidak layak konsumsi. Pilih bagian yang memiliki lapisan lemak tipis untuk menghindari asupan lemak jenuh berlebihan.

### Tips Mengolah dan Mengonsumsi

Untuk mendapatkan manfaat daging unta secara maksimal, simpan daging unta dalam suhu dingin sebelum diolah agar tetap segar dan terhindar dari kontaminasi bakteri. Untuk pengolahan yang lebih sehat, pilih metode merebus, memanggang, atau mengukus guna mengurangi tambahan lemak, dan hindari menggoreng dengan banyak minyak.

Konsumsi daging unta bersama sayuran atau sumber serat lain agar asupan nutrisi lebih seimbang. Batasi porsi sekitar 70-90 gram per sajian, cukup 2-3 kali per minggu, guna mengontrol asupan kolesterol dan purin.

Pastikan juga daging dimasak hingga matang sempurna, dengan suhu minimal 65°C, untuk membunuh bakteri berbahaya dan mencegah infeksi parasit.

Perlu diingat, mengonsumsi daging unta secara berlebihan tetap dapat meningkatkan kadar kolesterol atau asam urat, terutama pada orang dengan riwayat hipertensi, kolesterol tinggi, atau gangguan ginjal.

Oleh karena itu, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter sebelum mengonsumsi daging unta secara rutin. (nei,ist/dya)



# CINA CIPTAKAN ROBOT HUMANOID DENGAN FITUR GANTI BATERAI SENDIRI

**C**ina kembali menghadirkan inovasi di bidang robotika. Perusahaan teknologi UBTEch yang berbasis di Shenzhen merilis robot humanoid pertama di dunia yang mampu mengganti baterainya sendiri tanpa bantuan. Peluncuran ini dilaporkan oleh China Global Television Network pada Kamis, 17 Juli 2025, di pusat teknologi Shenzhen, wilayah selatan Cina.

Dalam video demonstrasi yang dirilis UBTEch, robot yang diberi nama Walker S2 tampak berjalan menuju stasiun pengisian daya dan melepas baterainya yang habis dari punggung atas dengan lengan, lalu memasangnya ke pengisi daya, dan mengambil baterai baru untuk digunakan. Dalam waktu tak lebih dari tiga menit, Walker S2 menyelesaikan seluruh proses tanpa sentuhan manusia sedikit pun.

"Bayangkan robot humanoid yang berjalan seperti yang Anda lakukan, dan tidak pernah berhenti bekerja," kata perusahaan UBTEch sebagaimana dikutip dari Forbes.

Dilansir dari NDTV, robot humanoid ini dibekali baterai lithium 48 volt dengan menggunakan sistem ganda. Hal ini memungkinkan robot dapat beroperasi selama dua jam saat berjalan atau empat jam dalam posisi berdiri sebelum perlu diisi ulang. Tak hanya itu, teknologi hot-swappable battery yang diterapkan pada Walker S2 memungkinkan penggantian daya tanpa harus mematikan sistem robot.

Kehadiran teknologi ini mencegah waktu henti robot selama pengisian daya serta memungkinkan pengoperasian berkelanjutan yang dapat mengurangi biaya perawatan. Tentunya semua keuntungan tersebut

sangat dibutuhkan untuk efisiensi produksi secara keseluruhan.

"Teknologi pertukaran baterai secara efektif memperpanjang waktu pengoperasian terus menerus," kata Presiden Eksekutif Asosiasi Industri Kecerdasan Buatan Shenzhen Fan Congming seperti dilansir dari CGTN.

Fan juga menambahkan bahwa dengan kemampuan kerja yang terus menerus, robot ini memungkinkan otomatisasi lini produksi berjalan tanpa jeda. "Jika tidak, mereka harus berhenti sejenak untuk mengisi daya dan kemudian kembali untuk melanjutkan pekerjaan, tetapi lini produksi tidak mampu berhenti," katanya.

Walker S2 dirancang untuk beroperasi di lingkungan seperti pabrik maupun ruang publik, yang mana ia dapat berinteraksi dengan pelanggan atau melakukan tugas secara mandiri.

South China Morning Post melaporkan, berdasarkan laporan Moody's, saat ini Cina hadir sebagai pembangkit tenaga robotik berkat kepiawaian Cina menggabungkan kecerdasan buatan canggih dengan produksi biaya jauh lebih rendah. Bahkan, menurut laporan Morgan Stanley, lebih dari separuh perusahaan yang mengembangkan robot humanoid secara global berasal dari Cina.

Menurut laporan yang dirilis pada Konferensi AI Dunia 2024 di Shanghai, nilai pasar robot humanoid di Cina pada 2024 mencapai sekitar 2,76 miliar yuan dan diprediksi melonjak menjadi 75 miliar yuan pada 2029.

Dilansir dari Tech in Asia, UBTEch selaku produsen robot humanoid



Robot Walker S2 buatan UBTECH. Foto: YouTube/UBTECH Robotics

pertama yang melantai di Bursa Saham Hong Kong pada 2023 telah menguji robot Walker di sejumlah pabrik kendaraan listrik Cina,

seperti BYD, Nio, dan Zeekr. Meskipun demikian, perusahaan UBTEch belum mengumumkan target produksi Walker S2 dalam jumlah besar. (nei,ist/dya)



HARIAN  
**LENTERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"  
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI  
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
www.lenteratoday.com  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**MEDIA TERVERIFIKASI**

**BIRO: SURABAYA:** YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO ( SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH  
**DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **INIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# Kefalonia, Liburan Musim Panas Pilihan Kylie Jenner

**K**ylie Jenner membagikan momen liburan musim panasnya di media sosial. Menariknya, sang model dan pebisnis itu memilih destinasi yang kurang dikenal luas. Musim panas kali ini ia habiskan di Kefalonia.

Bagian dari Kepulauan Ionia ini terletak di sebelah barat daratan Yunani. Tepatnya lebih jauh tersembunyi daripada pulau-pulau populer di selatan, seperti Mykonos dan Santorini. Menurut laporan The Daily Express pulau ini hanya menerima 755.929 pengunjung internasional pada tahun 2024. Sementara jumlah pengunjung Santorini mencapai 1,5 juta.

Damarios Osorio relationship manager perjalanan Yunani di Black Tomato mengatakan, Kefalonia terletak di pesisir barat di Laut Ionia sehingga sangat eksklusif dan unik, serta pantai-pantai yang tenang. Wisatawan yang mengunjungi pulau itu dapat menikmati beragam pengalaman luar ruangan, seperti menjelajahi gua, safari jip, coasteering, dan bermain kayak di laut.

Menurut dia, masih sangat sedikit orang yang ingin mengunjungi Kefalonia ketika berada di Yunani dibanding tempat wisata populernya. "Tempat ini tak terkecang dan sama indahnya. Sempurna bagi mereka yang mencari kombinasi petualangan dan ketenangan, inilah rahasia terbaik Yunani," ujar Osorio.

## Daya tarik Kefalonia

Dikutip dari Visit Greece, Kefalonia kaya akan sejarah dan tradisi budaya, dan perpaduan perpaduan hijau pegunungannya dengan air sebening kristal berwarna biru kehijauan di pantainya. Mulai dari Puncak Gunung Ainos yang ditumbuhi pepohonan pinus, cemara, dan zaitun. Di kaki gunungnya terdapat kebun anggur tempat varietas anggur Kefalonia Robola yang populer diproduksi.

Snorkeling atau menyelam di dasar laut sekitar pulau mungkin berkesempatan untuk dengan penyucareta-careta langka yang berlingung di sini, serta anjing laut biarawan monachus monachus. Termasuk pantai-pantai berpasir lembut nan indah yang disapu air biru kehijauan.

Aktivitas bisa dilakukan wisatawan di Kefalonia termasuk menjelajahi gua Melissani dan Drogarati, mengunjungi kota-kota kecil di sepanjang pantai seperti Argostoli (ibu kota Kefalonia), mendaki melalui Taman Nasional Gunung Ainos, dan tentu saja wisata kuliner.

## Pantai Myrtyos

Mungkin pilihan aktivitas paling populer di Pulau Kefalonia adalah perjalanan ke Pantai Myrtyos. Bahkan sebelum film Captain Corelli's Mandolin mengangkat nama Kefalonia, saya yakin pantai ini

telah menarik perhatian selama berabad-abad – orang-orang Romawi dengan toga mereka telah berdiri di atas tebing-tebing itu dan menatap dengan takjub. Sungguh unik dan indah!

Jalan yang melewati Pantai Myrtyos dan menawarkan pemandangan menakjubkan dari atas, terletak tinggi di tepi tebing. Bahkan di puncak musim panas, selalu ada tempat parkir dan seperti hampir di seluruh Kefalonia, Anda tidak perlu membayar. Tapi serius, apa Anda benar-benar hanya ingin melihatnya dari atas?

Datang sebelum pukul 11 untuk parkir mudah dan mendapatkan kursi santai. Pantai ini pernah jadi lokasi film Nicholas Cage, dengan pasir putih bersih dan laut berwarna unik. Sewa dua kursi dan payung seharga €10, tersedia toilet, kamar mandi, dan bar pantai.

## Assos

Salah satu "aktivitas" populer di Kefalonia lainnya adalah perjalanan ke Assos. Assos adalah kota pelangi Kefalonia. Namun, keindahannya tidak berhenti di situ – perpaduan sempurna antara medan, pepohonan, dan air biru jernih menarik para seniman dan penyair untuk mengabadikan keindahannya. Meskipun liburan musim panas menarik beberapa pengunjung untuk berenang di pantai, tempat ini sama sekali tidak ramai.

Makan siang di salah satu restoran tepi laut, lalu berjalanlah ke kastil tua Venesia di Assos untuk menikmati pemandangan teluk. Ada beberapa toko dan toko roti di Assos, tetapi kota ini sangat kecil dan Anda biasanya ingin mengunjunginya untuk melihat teluk.

## Kota Argostoli

Ibu kota pulau Kefalonia, Yunani, adalah kota Argostoli yang menawan dan sangat layak dikunjungi. Meskipun tidak secantik beberapa ibu kota pulau Yunani lainnya, Argostoli tetap memiliki pesona yang memikat.

Jangan berharap menemukan kedai minuman bercat putih dan gang-gang tua berbatu karena Argostoli menjadi korban Gempa Bumi Besar tahun 1953 dan sebagian besar rata dengan tanah. Namun, desain arsitektur tahun 50-an melekat di Kefalonia dengan cara yang paling unik dan meninggalkan tepian membulat yang indah serta warna-warna pastel di banyak area utamanya.

Argostoli adalah tempat ideal untuk menginap di Kefalonia dengan pilihan guest house dan hotel kecil. Lokasinya strategis, dekat transportasi umum, restoran, dan bar. Banyak pantai indah bisa dijangkau dengan bus 20 menit, dan dari bandara hanya sekitar 30 menit. Sebaiknya rencanakan kunjungan sesuai posisi matahari dan jadwal kapal. (nei,ist/dya)



**Ketar-ketir Akan (dari Hal 1) ...**

**T**erkait dengan kesepakatan tersebut transfer data antara Indonesia dan AS ini, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pernyataan bahwa negosiasi dengan Amerika Serikat masih terus berjalan.

"Ya nanti itu sedang di, kan negosiasi berjalan terus," ujar Prabowo di Jakarta, Rabu malam (23/7/2025) dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa transfer data yang dimaksud sebagai bagian dari kesepakatan tarif antara Indonesia dan AS. Data yang ditransfer hanya mencakup data komersial, bukan data pribadi maupun data strategis milik negara.

"Dalam Joint Statement US-Indonesia ada isu transfer data di mana keleluasaan transfer data yang diberikan kepada Amerika maupun negara mitra-mitra lainnya terfokus pada data-data komersial, bukan untuk data personal atau individu dan data yang bersifat strategis yang ketentuannya telah diatur dalam undang-undang maupun aturan terkait lainnya," kata Haryo di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Data pribadi mencakup informasi seperti nama, umur, atau nomor telepon, sedangkan data komersial yang dimaksud dalam isu tersebut meliputi data hasil penjualan perusahaan atau data dari riset lapangan. Misalnya pengolahan data penjualan di daerah tertentu yang dikumpulkan oleh perusahaan, atau bank, lalu dianalisis untuk kebutuhan bisnis. Itu yang dimaksud sebagai data komersial.

Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan bahwa kesepakatan perdagangan antara Indonesia dengan AS menjadi mekanisme hukum yang aman dalam mentransfer data pribadi ke AS.

Meutya juga mengatakan bahwa kesepakatan masih dalam tahap finalisasi, dan pembicaraan teknis masih akan berlangsung. Kemudian, dia mengatakan finalisasi kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS yang diumumkan pada 22 Juli 2025 oleh Gedung Putih bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas.

"Kesepakatan bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara," ujar dia dikutip Kompas Kamis (24/7/2025).

Bahkan, menurut Menkomdigi, kesepakatan tersebut malah dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan

data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di AS, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce.

Dia menandakan bahwa dalam hal ini prinsip utama yang dijunjung adalah tata kelola data yang baik, perlindungan hak individu, dan kedaulatan hukum nasional. Dia mengatakan pemindahan data pribadi lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum.

Meutya mencontohkan aktivitas pemindahan data yang sah antara lain, penggunaan mesin pencari seperti Google dan Bing. Kemudian ada juga penyimpanan data melalui layanan cloud computing, komunikasi digital melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram, pemrosesan transaksi melalui platform e-commerce, serta keperluan riset dan inovasi digital.

Dia juga mengatakan pengaliran data antarnegara tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia, dengan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan hukum nasional. "Pemerintah memastikan bahwa transfer data ke AS tidak dilakukan sembarangan. Sebaliknya, seluruh proses dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara," tambahnya.

Sebagai tambahan, pengaliran data antarnegara merupakan praktik global yang lazim diterapkan, terutama dalam konteks tata kelola data digital. Negara-negara anggota G7 seperti AS, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Britania Raya telah lama mengadopsi mekanisme transfer data lintas batas secara aman dan andal.

"Transfer data pribadi lintas negara pada prinsipnya ke depan adalah keniscayaan. Indonesia mengambil posisi sejajar dalam praktik tersebut, dengan tetap menempatkan perlindungan hukum nasional sebagai fondasi utama," tegas dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) dalam merealisasikan kesepakatan dagang antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya transfer data pribadi warga negara Indonesia (WNI) AS. Puan menandakan bahwa kesepakatan tetap harus berpijak pada ketentuan Undang-Undang PDP.

"Pemerintah harus bisa melindungi data pribadi warga

negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi," kata Puan di Kompleks DPR, Jakarta, pada Kamis (24/7/2024) dilansir tempo.

Puan mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menjelaskan aturan perlindungan data pribadi dan cara pengimplementasiannya dalam kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat tersebut. Setidaknya, apakah data pribadi warga negara Indonesia itu sudah terlindungi dan sampai mana batasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, juga mengingatkan jangan sampai tim negosiator Indonesia menyetujui skema transfer data lintas batas tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai. Terlebih lagi, lanjutnya, karena AS belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi (UU PDP) di tingkat federal yang seperti GDPR di Eropa, yang ada hanya UU PDP di beberapa negara bagian AS.

Diketahui, GDPR (General Data Protection Regulation) adalah peraturan Uni Eropa (Uni Eropa) yang mengatur perlindungan data pribadi. Tujuannya adalah untuk memberikan kendali lebih besar kepada individu atas data pribadi mereka dan menyederhanakan peraturan untuk bisnis di seluruh UE. Adapun organisasi yang melanggar GDPR dapat dikenakan denda hingga 4 persen dari omzet tahunan global mereka, atau 20 juta euro, tergantung mana yang lebih besar.

"Tim negosiator Indonesia harus memahami bahwa transfer data pribadi bukan sekadar isu perdagangan, melainkan juga menyangkut kedaulatan digital, keamanan nasional, dan keadilan ekonomi," ujar Politisi Fraksi PKS dalam keterangan tertulis, Kamis (24/7/2025).

Dia melanjutkan mekanisme transfer data harus tunduk pada UU PDP yang sudah dimiliki, seperti diatur dalam Pasal 56. Setiap transfer data ke AS harus disertai syarat yang setara, misalnya perlindungan hukum timbal balik, termasuk hak audit bagi otoritas Indonesia, dan kontrol penuh atas data strategis warga negara. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka Pengelola Data Pribadi harus memperoleh izin dari para subjek data untuk dilakukan CBDT.

"Nah, kita mendorong tim negosiator Indonesia memahami konteks seperti yang saya sebutkan tadi, juga tentunya memahami UU PDP. Sehingga, kita berharap para negosiator dapat merundingkan persoalan transfer data secara lebih detail dan sesuai dengan UU PDP yang kita miliki. Salah satunya kita perlu

menegaskan kedaulatan data (data sovereignty) dalam perjanjian guna memastikan bahwa data warga tetap berada dalam yurisdiksi hukum nasional, bahkan jika diproses di luar negeri, sebagaimana diatur dalam UU PDP Pasal 2," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI), Alex Budiyo mengatakan transfer data lintas data harus mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia. Khususnya Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Kemudian, Alex menambahkan Indonesia harus memiliki kerangka hukum yang jelas dan komprehensif soal transfer data lintas batas. "Kesepakatan antar dua negara juga harus diikuti dengan mekanisme transfer, standar keamanan dan hak subjek data yang datanya dikirimkan. Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan akuntabilitas dan transparansi pada saat proses transfer data dilakukan," kata Alex dikutip CNBCIndonesia, Kamis (24/7/2025).

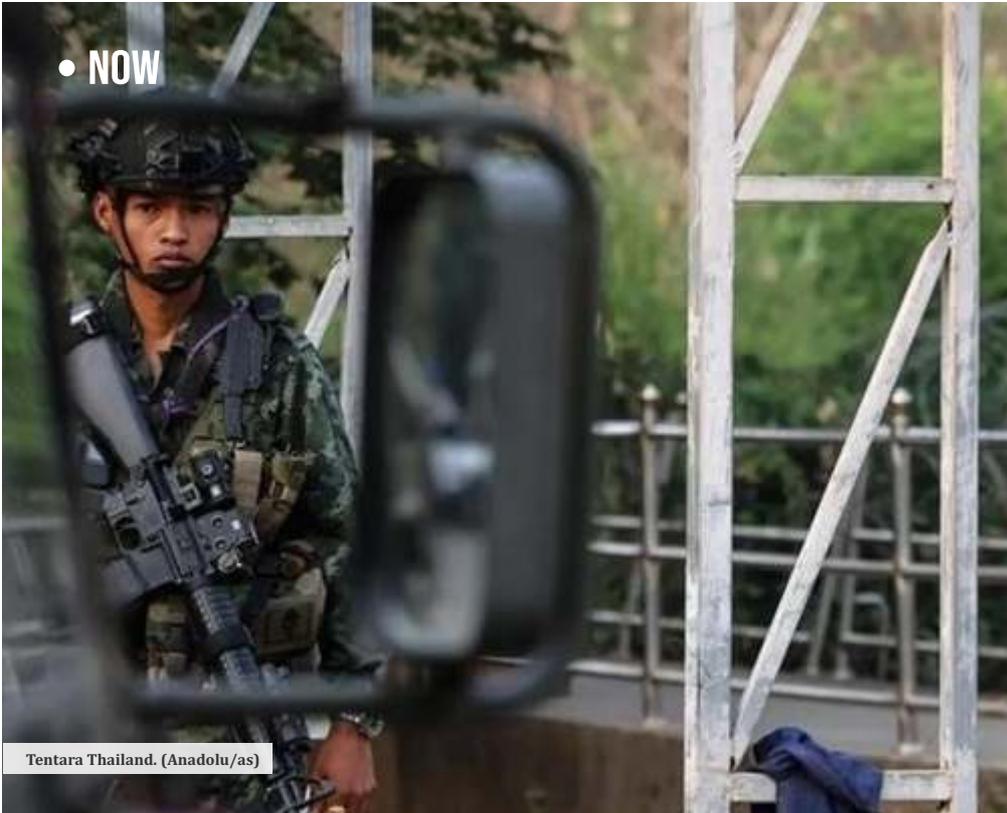
Senada, Peneliti Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Parasurama Pamungkas menegaskan pentingnya memastikan integritas dan kerahasiaan data di manapun data disimpan. Indonesia juga harus segera melaksanakan syarat transfer yang ada pada UU PDP untuk memastikan AS tidak memiliki kewenangan untuk mencederai integritas data berdasarkan hukumnya.

"Tidak masalah disimpan di mana pun asalkan dapat memastikan integritas dan kerahasiaan data pribadi tersebut," kata Parasurama.

"Indonesia harus segera melaksanakan syarat-syarat transfer berdasarkan UU PDP, termasuk membentuk lembaga yang akan menilai level kesetaraan. Penilaian tersebut salah satunya untuk memastikan bahwa Amerika Serikat berdasarkan hukumnya tidak memiliki kewenangan apapun untuk menciderai integritas data tersebut," dia menambahkan.

Pakar Keamanan Siber, Alfons Tanujaya, mengatakan yang terpenting bukan terkait data ditaruh di mana. Namun, harus bisa melindungi data itu sendiri dengan melakukan enkripsi data dengan baik.

"Kalau main copy dan safe aja jelas tidak aman. Jangan di Amerika, komputer kamu aja kalau simpan data itu enggak dienkripsi itu tidak aman. Kamu tidur di sebelah komputer kamu, itu nggak aman. Kenapa? Karena nggak dienkripsi. Jadi tidak amannya bukan karena disimpan di sebelah ranjang kamu atau di Amerika atau di China. Tetapi dienkripsi atau tidak itu yang membuat aman atau tidak aman," ujar Alfons. (han,ist/lut)



Tentara Thailand. (Anadolu/as)



# Konflik Thailand dan Kamboja Memuncak, 12 Orang Tewas

**Eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja memuncak pada Kamis (24/7/2025). Konflik kedua negara ini menyebabkan 12 orang tewas, sejumlah orang mengalami luka-luka, dan lebih dari 40 ribu warga dievakuasi.**

**M**enteri Kesehatan Thailand, Somsak Thepsuthin, dalam pernyataan terbaru melaporkan sejauh ini 12 orang dikonfirmasi tewas akibat serangan artileri dan roket yang ditembakkan pasukan Kamboja di area perbatasan. Para korban tewas itu terdiri atas 11 warga sipil dan satu tentara. Seorang anak termasuk di antara warga sipil yang tewas.

Somsak menambahkan sebanyak 24 warga sipil dan tujuh personel militer mengalami luka-luka. Dilansir Reuters dan The Guardian, Kamis (24/7/2025). Dari jumlah korban tewas itu, otoritas Thailand menyebut enam korban sipil di antaranya tewas di dekat sebuah pom bensin di distrik Kantharalak, Provinsi Sisaket, yang dihantam serangan. Sementara tiga orang lainnya, termasuk seorang anak laki-laki berusia delapan tahun, tewas di Provinsi Surin dan Ubon Ratchathani. Sekitar 10 warga sipil lainnya mengalami luka-luka di area yang sama.

Konflik terbaru ini merupakan rangkaian perselisihan batas wilayah antara kedua negara telah berlangsung selama lebih dari satu abad. Panjang berbagai titik perbatasan yang mencapai 817 kilometer itu belum sepenuhnya disepakati.

Konflik ini telah memicu serangkaian bentrokan berdarah selama bertahun-tahun, termasuk insiden besar pada 2011 yang berlangsung selama sepekan dan

melibatkan tembakan artileri berat dari kedua belah pihak.

Sedangkan pada eskalasi konflik kali ini, mereka saling menuding dan menyalahkan. Thailand menuduh Kamboja sengaja menerbangkan drone ke wilayah mereka, kemudian meluncurkan tembakan menggunakan roket ke desa-desa di sepanjang Distrik Phanom Dong Rak, Surin.

Sementara itu, Kamboja mengklaim Thailand lah yang memulai serangan. Perdana Menteri Hun Manet juga telah mengirimkan surat ke Dewan Keamanan PBB, untuk menggelar rapat darurat soal perang ini.

Thailand melancarkan serangan udara terhadap target-target militer Kamboja setelah pasukan Kamboja menembakkan roket dan artileri. Thailand mengerahkan enam jet tempur F-16 dari Provinsi Ubon Ratchathani, dan menargetkan dua lokasi militer Kamboja, menurut juru bicara deputi militer Thailand, Ritcha Suksuwanon.

Militer Thailand menyalahkan pasukan Kamboja atas tembakan pertama, dan menuduh mereka melakukan "serangan yang menasar warga sipil", dengan menyebut bahwa dua roket BM-21 menghantam permukiman di Distrik Kap Choeng, Surin, dan melukai tiga orang.

Menurut militer Thailand, bentrokan bermula sekitar pukul 07.35 pagi waktu setempat ketika satuan yang menjaga Candi Ta Muen mendengar suara drone Kamboja di atas wilayah mereka.

Beberapa saat kemudian, enam tentara Kamboja bersenjata - termasuk satu orang membawa granat berpeluncur roket (RPG) - mendekati pagar kawat berduri di depan pos Thailand.

Pasukan Thailand sempat meneriakan peringatan, namun sekitar pukul 08.20 pagi, pasukan Kamboja melepaskan tembakan ke

arah timur candi, sekitar 200 meter dari pos Thailand.

Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, menyatakan bahwa "situasi ini memerlukan penanganan hati-hati, dan kami harus bertindak sesuai dengan hukum internasional." "Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kedaulatan kami," tegasnya.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata menyatakan militer Thailand telah melanggar integritas teritorial Kerajaan Kamboja dengan melancarkan serangan

"Sebagai tanggapan, angkatan bersenjata Kamboja menjalankan hak sah untuk membela diri, sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional, untuk menghalau pelanggaran oleh Thailand dan melindungi kedaulatan serta integritas wilayah Kamboja," lanjut pernyataan tersebut.

Dilansir dari CNBCIndonesia, Bentrokan bersenjata ini merupakan puncak dari krisis diplomatik yang telah memanasi sejak Mei lalu, ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam kontak senjata singkat. Insiden tersebut memicu kemarahan publik dan meningkatkan ketegangan politik di kedua negara.

Puncaknya terjadi Rabu malam, ketika Thailand secara resmi menarik pulang duta besarnya dari Phnom Penh dan mengumumkan pengusiran duta besar Kamboja dari Bangkok. Langkah diplomatik ini diambil setelah dua prajurit Thailand kehilangan anggota tubuh akibat ranjau darat dalam waktu kurang dari seminggu di wilayah sengketa tersebut.

Thailand menuduh bahwa ranjau-ranjau tersebut ditanam baru-baru ini oleh pihak Kamboja-sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh Phnom Penh. Pemerintah Kamboja menyatakan bahwa para tentara Thailand telah keluar dari jalur yang telah disepakati

dan secara tidak sengaja memicu ranjau peninggalan perang sipil puluhan tahun lalu.

Menurut organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pembersihan ranjau (de-mining), Kamboja memang masih menyimpan jutaan ranjau aktif sisa dari konflik internal yang berkecamuk selama beberapa dekade. Namun, Thailand bersikeras bahwa ranjau-ranjau tersebut baru ditanam dalam beberapa waktu terakhir sebagai bentuk provokasi.

Atas konflik itu, Malaysia sebagai Ketua ASEAN menyampaikan kekhawatirannya. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, meminta dilakukan negosiasi. "Situasinya mengkhawatirkan. Mereka anggota kunci ASEAN dan negara tetangga dekat Malaysia," kata Anwar, dikutip New Straits Times. (ist/lut)

## KRONOLOGI KONFLIK THAILAND-KAMBOJA (JULI 2025)

- **Mei 2025:**  
Tentara Kamboja tewas dalam kontak senjata. Ketegangan meningkat.
- **Pertengahan Juli:**  
Dua tentara Thailand terluka akibat ranjau. Thailand tuding Kamboja, Phnom Penh membantah.
- **23 Juli:**  
Thailand tarik dubes dari Phnom Penh dan usir dubes Kamboja.
- **24 Juli:**  
- Bentrokan bersenjata di perbatasan.  
- 12 tewas (termasuk anak), 31 luka, 40 ribu warga mengungsi.  
- Thailand kirim serangan udara, Kamboja tuding pelanggaran wilayah.
- **ASEAN:**  
Malaysia serukan negosiasi damai.

